

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Media massa memiliki peranan yang vital dalam demokrasi. Sebagai institusi informasi, media dapat dilihat sebagai faktor yang paling berpengaruh pada proses perubahan sosial dan politik. (Putri, 2012: 19) Media massa atau pers dapat ikut memperkokoh demokrasi dengan peliputan kehidupan politik yang pada akhirnya dapat mendidik audiens atau pembaca sehingga lebih paham mengenai isu-isu publik, dan dapat memberi dukungan politis yang berkualitas. (Putra, 2004: 132) Isu publik ini, meliputi pula kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang tak lepas dari sorotan media adalah pemberian remisi dan grasi oleh Presiden.

Pemberitaan pemberian remisi pada tersangka pembunuhan jurnalis muncul sejak bulan Januari sampai Februari 2019. Penelitian ini membahas pemberitaan yang muncul di media *online* dalam kurun waktu 23 Januari – 9 Februari 2019. Adapun tanggal 23 Januari 2019 adalah permulaan isu ini berhembus, dan tanggal 9 Februari 2019 adalah hari pencabutan remisi yang dilakukan oleh Jokowi. Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan pada seseorang yang dijatuhi pidana. Peraturan mengenai remisi saat ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.74 Tahun 1999. Adapun remisi dapat diberikan jika yang bersangkutan baik selama menjalani pidana. (Rori, 2013: 25)

Pada tahun 2019, ada dua pemberian grasi dan remisi yang mendapat perhatian khusus oleh publik dan media, yaitu pemberian grasi untuk Abu Bakar Ba'asyir, terpidana kasus terorisme, serta I Nyoman

Susrama, terpidana kasus pembunuhan jurnalis harian Radar Bali, Anak Agung Gde Bagus Narendra Prabangsa.

Prabangsa sendiri dulunya merupakan redaktur koran Radar Bali. Ia membuat tiga berita mengenai kasus korupsi yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Bangli. Setelah dilakukan investigasi, pada 25 Mei 2009, polisi mengumumkan sembilan tersangka pelaku pembunuhan Prabangsa. Dalang pembunuhan tersebut adalah Susrama, dibantu oleh delapan orang anak buahnya. Ia pun kemudian mendapatkan vonis penjara seumur hidup. Kasus pembunuhan terhadap wartawan untuk pertama kalinya diungkap, dan pelakunya diadili. (Rizal, 2019) Pemberian remisi ini mengubah masa hukuman Susrama dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun penjara.

Pemberitaan mengenai pemberian remisi pada Susrama ini lantas menarik perhatian dari media, baik media cetak, elektronik, maupun *online*. Kritik serta demo dari organisasi jurnalis di Indonesia disorot. Hal ini menjadi polemik, karena di sisi lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly mengatakan, persetujuan pemberian remisi tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan berbagai pertimbangan, dan sesuai dengan prosedur. (Ihsanuddin, 2019)

Lebih jauh, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menyatakan bahwa kasus remisi Susrama ini dapat berpotensi mengganggu elektabilitas Jokowi, yang kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Hal ini dipertegas oleh pernyataan pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun bahkan mengatakan bahwa hal ini dapat memengaruhi elektabilitas Jokowi, yang kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2019. (Sitepu, 2019)

... Kekeliruan itu kemudian berdampak negatif dan akibatnya karena persepsi publik negatif terhadap

petahana, tentu akan terjadi erosi elektoral, akan ada penurunan elektabilitas dari Jokowi. (Sitepu, 2019)

Karena hal tersebut, di balik pemberian remisi ini, menurut peneliti unsur politik kental mewarnai di dalamnya. Pakar hukum, Leopold Sudaryono bahkan menyatakan bahwa pemberian grasi atau remisi memiliki kecenderungan meningkat drastis di tahun politik, termasuk pada pemilu sebelumnya. Meski demikian, ia menyatakan butuh bukti untuk menyatakan apakah ada hubungannya dengan tahun politik. (Sitepu, 2019) Di sisi lain, Juru Bicara (Jubir) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi, Ledia Hanifa Amaliah mengklaim bahwa kebijakan pemberian remisi yang *blunder* ini termasuk salah satu faktor yang dapat mengerek elektabilitas pasangan calon yang diangkatnya. (Bebey, 2019) Isu politik yang berhembus dalam kejadian ini membuat peliputan berita menjadi kompleks. Liputan politik sendiri cenderung lebih rumit dibanding reportase lain, karena adanya dimensi pembentukan opini publik (*public opinion*) di dalamnya, baik oleh para politisi maupun oleh wartawan. (Hamad, 2004: 2) Adapun opini publik adalah cara singkat untuk melukiskan kepercayaan atau keyakinan yang berlaku di masyarakat tertentu bahwa hukum-hukum tertentu bermanfaat. (Nimmo, 2005: 10) Isu mengenai pemberian remisi ini menjadi menarik, karena melibatkan profesi kewartawanan, hukum serta isu politis tersebut.

Subyek yang diambil dalam penelitian ini adalah Medcom.id, Kompas.com, Viva.co.id dan Jawapos.com. Sebagai salah satu media yang berkembang dengan pesat, keberadaan media *online* tidak dapat diabaikan. Nielsen Indonesia menyatakan bahwa di Indonesia, pembaca media digital sudah jauh lebih banyak daripada media cetak. Tingkat penetrasi media

digital naik hingga 11% dengan jumlah pembaca 6 juta orang pada 2017. (Reily, 2017)

Setiap media memiliki gayanya tersendiri dalam mengemas suatu peristiwa, dan hal tersebut dapat diamati lewat sudut pandang (*angle*) yang dipilih. Yang pertama adalah Medcom.id. Media ini menerbitkan total 11 berita yang mengangkat mengenai isu ini, dalam kurun waktu 23 Januari – 9 Februari 2019. Pada permulaan isu muncul, Medcom terlihat menonjolkan pendapat Menkumham dalam dua berita yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari, yaitu melalui berita berjudul *Yasonna: Susrama Bukan Diberikan Grasi*, dan *Yasonna Sebut Tindakan Susrama Bukan Kejahatan Luar Biasa*. Pada berita kedua, Medcom mengutip pernyataan Yasonna Laoly yang mengatakan bahwa Susrama bukan pelaku kejahatan luar biasa.

“Jadi, jangan melihat sesuatu sangat politis. Jadi dihukum itu orang tidak dikasih remisi? Enggak muat itu Lapas semua kalau dihukum, enggak pernah dikasih remisi.” (Iradat, 2019)

Kompas.com memberikan banyak porsi pula untuk isu ini. Sebanyak 20 berita diterbitkan. Pada tanggal yang sama, Kompas menerbitkan sebuah berita berjudul *Remisi Jokowi untuk Pembunuh Wartawan Dikecam AJI, Ini Kata Menkumham*. Dalam berita tersebut, Kompas menyertakan alasan dari Ketua AJI, Abdul Manan.

Nandhang menjelaskan, pengungkapan kasus pembunuhan Prabangsa tahun 2010 silam menjadi tonggak penegakan kemerdekaan pers di Indonesia.

Sebab, sebelumnya tidak ada kasus kekerasan terhadap jurnalis yang diungkap secara tuntas di sejumlah daerah di Indonesia, apalagi dihukum berat. (Ihsanuddin, 2019)

Selanjutnya adalah Viva.co.id. Pada pemberitaannya, Viva memberikan tempat bagi pihak-pihak yang terkait dengan isu ini untuk

bersuara. Sebanyak total 7 berita. Menariknya, Viva juga memberitakan mengenai tanggapan tim Prabowo, lawan Jokowi dalam kontestasi Pemilu 2019, dalam artikel berjudul *Tim Prabowo Kecam Jokowi yang Beri Remisi Pembunuh Jurnalis*. Narasumbernya adalah Dhimam Abror Djuraid, Wakil Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Menurut Dhimam, keputusan Presiden Joko Widodo memberikan remisi terhadap pembunuh jurnalis tidak cermat. Jokowi terkesan tidak menimbang dampak yang akan ditimbulkan atas kebijakan pemberian remisi tersebut. (Tim Viva, 2019)

Selanjutnya adalah Jawapos.com. Perhatian peneliti terfokus pada intensitas pemberitaan yang besar. Pada isu ini, Jawa Pos menerbitkan sebanyak 50 berita, dalam kurun waktu yang sama dengan amatan peneliti pada media *online* yang lain. Jawa Pos mengambil narasumber yang lebih beragam seperti AJI, Dahnil Anzar Simanjuntak, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandi, dan Haris Azhar, Direktur Lokataru *Foundation*. Nama Joko Widodo (Jokowi) disebutkan hampir di sebagian besar judul artikelnya, seperti *AJI Kecewa Jokowi Beri Grasi ke Pembunuh Wartawan, DPR: Muncul Persepsi Jokowi Tidak Pro Terhadap Pemberantasan Korupsi*, sampai *Demokrat: Komitmen Jokowi Terhadap Perlindungan Warga Dipertanyakan*. Pada artikel terakhir, Jawa Pos mengutip Ferdinand Hutahean, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat.

Pemberian grasi Presiden Jokowi ini bisa menjadi preseden buruk. Apalagi para pembunuh tidak akan takut menghilangkan nyawa manusia. Ferdinand menduga, mereka akan berpikir akan mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi apabila menghilangkan nyawa seseorang. (Wibisono, 2019)

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang (*angle*) yang diambil oleh masing-masing media terhadap isu ini. Media bukan saluran yang bebas. Wartawan mengonstruksi realitas yang dilihatnya ke dalam pemberitaan yang dibuat. Isi pemberitaan media, menurut Shoemaker & Reese dapat dipengaruhi oleh lima faktor yang terbagi dalam beberapa level. Level tersebut antara lain level individu pekerja media, rutinitas media, organisasi media, luar media, dan ideologi. (Sobur, 2012: 138) Misal, pada level organisasional. Pemberitaan juga harus memikirkan keuntungan materiil bagi kepentingan media tersebut. (Sobur, 2012: 139) Kepribadian setiap media tercermin pada politik media yang dijabarkan dalam bentuk visi dan misinya yang dimanifestasikan menjadi politik redaksi (*editorial policy*) setiap media. (Budianto, 2011: xiii)

Bila ditelusuri lebih lanjut, Medcom.id adalah situs berita yang berada di bawah naungan Media *Group* yang dimiliki oleh Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Media *Group* disebut sebagai kerajaan media setelah mendirikan Metro TV pada tahun 2001. (Adam, 2018) Partai Nasdem merupakan salah satu partai pengusung Jokowi di 2019. Surya Paloh kerap menggunakan bisnis medianya sebagai sarana untuk berpolitik.

“Jika saya tidak dapat memakainya, apalagi yang dapat saya pakai? Jika ada jurnalis yang tidak setuju dengan situasi ini, mereka bebas keluar dari Metro [TV] atau Media Indonesia. Saya tidak mau hipokrit.”

Pernyataan itu dilontarkan Surya Paloh ketika ia menggunakan lini bisnis media miliknya untuk meraup dukungan dari Golkar dalam konvensi capres jelang pemilu 2004, demikian catat Ross Tapsell dalam buku *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution* (2017). (Bhaskara, 2018)

Lalu, Kompas.com merupakan salah satu pionir media *online* Indonesia yang berada dalam naungan grup Kompas Gramedia. Kompas Gramedia sendiri didirikan oleh Jakob Oetama dan PK Ojong. Para

pemilikinya tidak berafiliasi dengan partai politik. Kompas.com juga melarang setiap karyawannya untuk terlibat dalam kegiatan politik. (kompas.com) Kompas.com sendiri termasuk dalam salah satu media pada survei yang diadakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan G Communications mengenai sikap enam media massa di Pilpres 2019. Secara kualitatif, konten pemberitaan mengenai Pilpres 2019 di media ini masih netral. (Prabowo, 2019) Bila dibandingkan dengan versi cetaknya, intensitas pemberitaan pada media *online* Kompas lebih banyak. Ditinjau dari peringkatnya di alexa.com, Kompas menempati peringkat ke 7. Alexa.com sendiri merupakan sebuah *web* yang melakukan pengumpulan *database* mengenai situs internet di dunia (Arifin, 2013: 195)

Sementara, Viva.co.id adalah media yang berada di bawah naungan Bakrie *Group* kepemilikan Aburizal Bakrie. Aburizal Bakrie saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar yang saat ini juga berada dalam koalisi Jokowi. Namun, pada Pemilu 2014, Bakrie dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo sebagai Calon Presiden. Bahkan pada tahun 2014, TVOne yang berada di bawah kepemilikan Bakrie menjadi media televisi yang mencolok karena menampilkan klaim kemenangan Prabowo dalam *quick count*. (Tapsell, 2015: 47) Berkaitan dengan kontestasi Pemilu tahun 2019, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengklaim bahwa hati Aburizal Bakrie sesungguhnya lebih condong untuk mendukung Prabowo pada Pemilu 2019 ini. (Putri, 2018)

Sementara, JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Grup, jaringan media terbesar di Indonesia. Jawa Pos memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bisnis digital dari Jawa Pos ini sendiri hadir pada 2014. Kepemilikan Jawa

Pos saat ini tidak berafiliasi dengan partai politik. Pemberitaan di media *online* Jawa Pos ini menempati intensitas tertinggi apabila dikomparasi dengan media *online* lain seperti Tirto.id (22 berita) dan Kumparan.com (31 berita). Bila dibandingkan dengan versi cetaknya pun intensitas yang banyak ini tentunya membuatnya berbeda. Selain itu, Jawa Pos merupakan induk dari Radar Bali, tempat sang wartawan bekerja. Perbedaan kepemilikan dari media-media inilah yang mendasari peneliti memilih keempatnya. Di mana dua di antaranya berafiliasi dengan partai politik, sementara yang lain tidak. Bagaimana media-media ini menanggapi isu ini?

Penonjolan, seperti yang dilakukan oleh keempat media tersebut merupakan salah satu bagian dari konsep *framing*. *Framing* menurut Robert N. Entman merupakan proses seleksi dari aspek realitas yang kompleks, sehingga hanya beberapa bagian saja yang lebih menonjol dibandingkan aspek yang lain. (Eriyanto, 2012: 77) Pusat perhatian dari analisis sendiri adalah bagaimana pemahaman dan pemaknaan media mengenai realitas, serta realitas tersebut ditandakan dengan cara apa. (Mayangsari & Putra, 2016) Melihat adanya perbedaan penonjolan yang dilakukan oleh media-media tersebut, maka menjadi menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana *frame* (bingkai) yang diangkat sehubungan dengan pemberian remisi terhadap pembunuh wartawan Radar Bali tersebut.

Pemberitaan mengenai pemberian remisi ini kemudian akan dianalisis menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki karena pada model ini analisis *framing* dilihat bersama bagaimana wacana publik mengenai suatu isu atau kebijakan dikonstruksi (dibentuk) dan dinegosiasikan. (Eriyanto, 2012: 289-290)

Adapun penelitian sebelumnya yang membahas mengenai *framing* adalah *Analisis Framing Pemberitaan Rencana Tindakan Makar Pada*

Enam Surat Kabar Harian oleh Oblias Tassoma, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi UKWMS tahun 2018. Hasil yang didapat adalah terdapat perbedaan dalam mengisahkan kejadian rencana tindakan makar pada Media Indonesia, Republika, Jawa Pos, Tempo dan Kompas. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya ideologi media. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek yang diteliti. Penelitian ini akan menggunakan Okezone.com, Medcom.id, Kompas.com dan Jawapos.com sebagai subjek.

Selain itu, ada pula penelitian berjudul *Analisis Framing Berita Mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar di mediaindonesia.com dan vivanews.com Tanggal 7 September 2011*. Penelitian ini sendiri dilakukan oleh Gema Mawardi, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia pada tahun 2012. Hasil dari penelitian itu bahwa adanya perbedaan *framing* yang digunakan pada media tersebut, karena dipengaruhi oleh kepemilikan media. Metode analisis *framing* yang digunakan pada penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode *framing* Zhongdang Pan dan Kosicki. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek yang digunakan.

I.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: bagaimana bingkai (*frame*) pemberitaan mengenai pemberian remisi pada tersangka kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali di Medcom.id, Kompas.com, Viva.co.id, Jawapos.com?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bingkai (*frame*) pemberitaan mengenai pemberian remisi pada tersangka

kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali di Medcom.id, Kompas.com, Viva.co.id, dan Jawapos.com.

I.4. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada berita pemberian remisi pada tersangka kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali, mulai tanggal 23 Januari – 9 Februari 2019 di Medcom.id, Kompas.com, Viva.co.id, dan Jawapos.com.

I.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat akademis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

I.5.1. Manfaat Akademis

Menambah kajian ilmu komunikasi mengenai pembingkaiian (*framing*) berita mengenai peristiwa yang berkaitan dengan jurnalis salah satu surat kabar.

I.5.2. Manfaat Praktis

Memberikan pembahasan mengenai perspektif yang digunakan oleh Medcom.id, Kompas.com, Viva.co.id, dan Jawapos.com dalam memberitakan mengenai kebijakan pemberian remisi tersangka pembunuh jurnalis. Selain itu, pembaca diharapkan dapat tercerahkan mengenai adanya praktik pembingkaiian dalam pemberitaan, sehingga dapat lebih netral dalam menyikapinya.